

URUSAN PERDAGANGAN

1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

a) Tujuan :

Untuk mewujudkan Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor baik melalui pelabuhan laut maupun maupun udara di wilayah Jawa Timur.

b) Sasaran :

- Meningkatnya pertumbuhan ekspor secara bertahap, dengan komposisi produk yang lebih beragam dan berdaya saing tinggi.
- Meningkatnya keberdayaan eksportir kecil dan menengah melalui pemberian insentif dan fasilitas akses informasi dan sumber pembiayaan.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor sebesar Rp. 20.820.000.000,00 dengan realisasi Rp. 20.132.736.354,00 (96,70%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran (Matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Meningkatnya ekspor non migas menjadi US \$ 17,40 Milyar atau naik 38,75% dibanding tahun 2010 yang hanya mencapai US \$ 12,54 milyar
- Meningkatnya jumlah eksportir Jawa Timur sebanyak 1,064 orang atau naik 5,45% dibanding tahun 2010 yang mencapai 1,006 orang
- Meningkatnya jumlah komoditi ekspor Jawa Timur dari 34 komoditi pada tahun 2010 menjadi 35 komoditi pada tahun 2011.
- Meningkatnya jumlah nilai ekspor dari US\$ 15,340,476,475,- pada tahun 2010 menjadi US\$ pada tahun 2011.

e) Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah

Permasalahan

- Adanya perubahan kebijakan perdagangan ekspor maupun impor yang dapat menjadi penghambat dalam proses ekspor dan impor.
- Masih sulitnya menyediakan data ekspor dan impor secara up to date karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak memiliki jaringan online PEB dengan Bea Cukai.
- Sosialisasi peluang ekspor telah dilakukan tapi belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh eksportir karena terbatasnya informasi tentang kebijakan ekspor per komoditi.
- Setiap tahun telah ada pembukaan pasar baru, tetapi jaringan pemasaran pada pasar baru tidak dapat dipertahankan pada tahun berikutnya.
- Pelatihan ekspor telah dilaksanakan di P3ES tetapi pertumbuhan eksportir masih lamban.
- Masih terbatasnya informasi tentang keberadaan P3ES bagi instansi pemerintah di lingkungan Provinsi Jawa Timur, sehingga belum menjadi salah satu tujuan kunjungan bagi tamu SKPD di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
- Masih tingginya impor bahan baku dan komponen industri.

Upaya Pemecahan Masalah

- Perlunya dilakukan sosialisasi kebijakan perdagangan ekspor maupun impor secara kontinu baik untuk komoditi maupun negara sehingga tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan ekspor / impor.
- Perlunya keterbukaan data ekspor / impor dari bea cukai maupun BPS sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat menyediakan data ekspor dan impor secara up to date dan dapat menganalisa setiap permasalahan yang terjadi dalam ekspor dan impor.

- Untuk dapat memperkuat jaringan pasar maka perlu dilakukan penjajakan pada setiap pasar baru yang akan dibuka serta sosialisasi pasar kepada eksportir / calon eksportir.
- Perlunya dilakukan sosialisasi peluang ekspor kepada eksportir / calon eksportir / IKM yang telah mengikuti pelatihan di P3ES.
- Promosi P3ES tidak hanya perlu dilakukan di kabupaten / kota, tetapi juga perlu dilakukan di tingkat provinsi, melalui sosialisasi atau pemberian liftlet ke SKPD di tingkat provinsi Jawa Timur, sehingga tamu – tamu dari provinsi lain dapat diarahkan ke P3ES.
- Perlunya dilakukan kerjasama dengan asosiasi, Kadin, Disnaker maupun instansi terkait untuk memproduksi bahan / komponen substitusi impor.

f) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi

Sebagai bentuk penghargaan kepada eksportir Jawa Timur yang telah berprestasi secara nasional menyumbangkan devisa dengan signifikan terhadap ekonomi Jawa Timur, maka Pemerintah Pusat telah memberikan *Apresiasi* kepada 2 (dua) eksportir Jawa Timur melalui penganugrahan **PRIMANIYARTA 2011** yang telah diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2011 kepada:

a. Kategori Eksportir Pembangun Merk Global :

- PT. INSERA SENA (memproduksi sepeda)

b. Kategori Eksportir Usaha Kecil Menengah

1. CV. SEKAWAN COSMETICS (memproduksi Kosmetik)

Selain itu, atas kinerja dari program ini, Pemerintah Provinsi Jawa timur memberikan penghargaan kepada 12 eksportir dengan kategori sebagai berikut;

a. Kategori Eksportir Berkinerja :

- PT. Alumindo Light Metal Industry yang memproduksi Aluminium
- PT. Langgengkarya Makmur Lestari yang memproduksi Pelat, lembaran
- PT. Trias Sentosa Tbk. yang memproduksi Film dari poliester lainnya
- PT. Berdikari Meubel Nusantara yang memproduksi mebel
- PT. Ispat Indo yang memproduksi baja
- PT. Teja Sekawan Cocoa Industries yang memproduksi coklat berbentuk balok
- PT. Smelting yang memproduksi Tembaga
- PT. Bumi Menara Internusa yang memproduksi Udang

b. Kategori Eksportir Pembangun Merek Global:

- PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. yang memproduksi Maltosa

c. Kategori Eksportir Usaha Kecil Menengah :

- PT. Kernel Indonesia Potential yang memproduksi furniture
- Artho Metal yang memproduksi Kompor Gas

d. Kategori Eksportir Barang Dan Jasa Ekonomi Kreatif

- UD.Cococraft Kreasi Gemilang yang memproduksi Handycraft

2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

a) Tujuan

Program ini bertujuan meningkatkan efisiensi distribusi perdagangan, sarana dan prasarana penunjang perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing produk Jawa Timur.

b) Sasaran

Pelaksanaan program ini memiliki sasaran yang multilevel bukan saja kepada dunia usaha dan konsumen tetapi juga masyarakat, berupa :

- Peningkatan perlindungan kepada konsumen melalui stabilisasi pasar dan distribusi kebutuhan pokok, pengendalian inflasi serta pengawasan barang beredar dan BDKT.
- Menjamin ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat melalui peningkatan pasar dan distribusi produk agro serta pembinaan pasar dan lelang agrobis.
- Mengembangkan pasar dalam negeri melalui promosi, pameran, himbauan penggunaan produk dalam negeri.
- Perumusan alternatif solusi, dan implementasi penyelesaian permasalahan, termasuk harmonisasi berbagai perangkat peraturan perundang-undangan tentang distribusi dan sarana penunjang perdagangan.
- Deregulasi dan debirokratisasi untuk mengurangi hambatan perdagangan
- Pemberdayaan pengusaha dagang mikro, kecil dan menengah melalui peningkatan sumber daya manusia, akses pasar, dan kemitraan usaha.
- Pemantapan dan pengembangan pasar lelang lokal dan regional, serta sarana alternatif pembiayaan.
- Memajukan perdagangan antar pulau memulai pembukaan Kantor Perwakilan dagang di Provinsi lain.
- Mengurangi angka kemiskinan melalui pemberian fasilitasi alat dan bahan baku perdagangan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp. 38.423.000.000,00 dengan realisasi Rp. 35.297.462.553,00 (91,87%),

secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Meningkatnya ekspor impor antar provinsi sebesar 14,88% dari 390.176,42 Miliar Rupiah pada tahun 2010 menjadi 448.226,13 miliar rupiah pada tahun 2011. Dimana ekspor impor antar provinsi ini mengalami surplus pada nilai 30.717,46 miliar rupiah.
- Meningkatnya konsumsi rumah tangga sebesar 15,46% dari 516.581,33 miliar rupiah di tahun 2010 menjadi 596.413,77 miliar rupiah. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan daya beli masyarakat yang dikarenakan rendahnya inflasi, meningkatnya perlindungan konsumen dan distribusi barang kepada konsumen.
- Rendahnya inflasi Jawa Timur yang hanya mencapai 4,09% dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 6,96%. Terutama untuk komoditi bahan makanan yang mengalami inflasi terendah dalam 5 tahun terakhir yaitu hanya 3,75%. Salah satu faktor pendukung dalam menjaga inflasi adalah adanya pemantauan harga bahan pokok melalui pelaksanaan Sistem Informasi Harga Online dengan 38 kabupaten / kota. Dengan sistim ini kenaikan harga di suatu wilayah kabupaten dengan cepat terpantau dan tertangani. Selain itu pelaksanaan Sistim Resi Gudang dan lelang agrobis telah membantu penyediaan stock dan memperlancar arus distribusi.
- Meningkatkan perdagangan antar wilayah ke Nusa Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Maluku. Data muat barang ke 10 Provinsi tersebut diatas, telah mengalami peningkatan sebesar 15,17% dari 48,021 triliun rupiah di tahun 2010 menjadi 55,170 triliun rupiah

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahan

Permasalahan

- Data perubahan harga komoditi per Kecamatan belum dapat dikontrol, karena sistim baru dijalankan.
- Pengawasan terhadap distribusi produk belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena belum lengkapnya data stock yang lengkap.
- Hasil transaksi dari proses pelelangan belum dapat diketahui karena tidak adanya laporan dari pihak – pihak yang melakukan transaksi.
- Data antar pulau (data bongkar) belum dapat diketahui secara jelas karena belum adanya forum kerjasama data dan informasi dengan pihak pihak yang terkait.

Upaya Pemecahan Masalah

- Melakukan koordinasi dengan operator pemantauan harga kabupaten / kota dan melaksanakan pemantauan secara kontinu melalui data online.
- Perlunya dilakukan koordinasi dengan distributor bahan pokok agar perubahan stock dari waktu ke waktu dapat dipantau dengan cepat dan akurat.
- Untuk mengetahui keberhasilan transaksi setelah proses pelelangan maka para pembeli dan penjual yang telah melakukan transaksi maupun gagal melakukan transaksi perlu memberikan laporan setelah batas waktu akhir yang ditentukan agar kegagalan dalam transaksi dapat dicarikan solusinya.
- Tahun 2012, akan dilakukan koordinasi secara intensif dan dibentuk forum data dan informasi perdagangan antar pulau dengan pihak – pihak terkait.

f) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi (terkait dengan program)

Untuk memberikan penghargaan kepada para pedagang antar pulau yang telah meningkatkan devisa Jawa Timur, maka melalui kegiatan ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberikan penghargaan pedagang antar pulau dengan kategori :

- Kategori Pedagang Besar
- Kategori UKM (Usaha Kecil Menengah)
- Kategori Pedagang Perintis

3) Program Peningkatan Perlindungan Konsumen

a) Tujuan

Tujuan program ini adalah memberdayakan konsumen, penguatan lembaga perlindungan konsumen, dan peningkatan kapasitas kelembagaan metrologi legal, serta optimalisasi pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan.

b) Sasaran

- Pemberdayaan konsumen dan peningkatan kapasitas lembaga perlindungan konsumen, termasuk kapasitas lembaga penyelesaian sengketa konsumen.
- Perkuatan sistem dan pelaksanaan pengawasan barang beredar, terutama terhadap pengawasan barang-barang strategis, obat dan makanan.
- Peningkatan pelayanan informasi dan advokasi terhadap kebijakan perlindungan konsumen guna meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya standar barang dan jasa, terutama di bidang obat dan makanan.
- Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perdagangan dalam negeri yang terkait dengan eksporimpor, tertib usaha, tertib

ukur, perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar dan jasa.

- Sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan standar dan laboratorium metrologi legal, serta pelaksanaan pengawasan ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapannya (UTTP).
- Peningkatan dan perkuatan kapasitas laboratorium penguji dan sertifikasi mutu barang terutama untuk produk eksporimpor.
- Peningkatan dan perkuatan kapasitas Unit Pelayanan Teknis Kemetrolgian dan laboratorium kemetrolgian.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen sebesar Rp. 45.156.000.000,00 dengan realisasi Rp. 41.605.899.409,00 (92,14%), yang secara rinci per kegiatannya dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Meningkatnya penerbitan SKA oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur sebesar 2,43 %, dari 111,122 formulir di tahun 2010 menjadi 113,813 formulir di tahun 2011. Ini menunjukkan adanya peningkatan minat eksportir dan importir untuk menjadikan pelabuhan dan bandara di Jawa Timur sebagai pelabuhan ekspor dan impor. Salah satu hal yang kepercayaan ini, karena meningkatnya kemampuan UPT Pengujian dan Standardisasi Mutu Barang dalam melaksanakan pengujian terhadap banrang ekspor impor Jawa Timur. Tahun 2011 telah dilaksanakan pelayanan sertifikasi mutu barang ekspor impor sebanyak 12.750 sertifikat
- Selain itu juga jumlah unit yang ditera dan ditera ulang yaitu sebanyak 1.159.979 unit pada tahun 2011 dan pada tahun 2010 sebanyak 1.362.537 unit.

e) Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah

Permasalahan

- Masih banyak penjual pada pasar – pasar tradisional yang belum mendapatkan pengawasan dan pemantauan dalam penggunaan alat timbangan, takar dan ukur lainnya sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.
- Masih banyaknya masyarakat yang membeli rokok tanpa cukai
- dan tembakau khususnya dan masyarakat umumnya.
- Masih terbatasnya standar komoditi ekspor – impor rokok dan pengolahan tembakau.
- Terbatasnya pengetahuan alat timbang para petani sehingga menimbulkan kerugian bagi mereka dalam melakukan penjualan.
- Masih adanya perdagangan barang dalam keadaan tidak terbungkus.
- Masih adanya impor komoditi yang tidak sesuai dengan standar Indonesia.

Upaya Pemecahan Masalah

- Akan dilaksanakan pengawasan dan pemantaun ke pasar tradisional dan sosialisasi kepada para penjual sehingga timbul kesadaran untuk menggunakan alat takar dan ukur yang benar sehingga tidak merugikan konsumen dan meningkatkan daya beli.
- Perlunya dilakukan pembinaan dan bimbingan pengawasan bagi industri rokok tanpa cukai.
- Sosialisasi, pembinaan dan bimbingan akan dilakukan pada industri pengolahan tembakau dan rokok agar mereka dapat melakukan produksi sesuai dengan SNI dan memiliki kesiapan dalam penerapan SNI. Selain itu perlu juga diberikan sosialisasi bagi masyarakat agar mereka mengkonsumsi komoditi yang ber- SNI. Melalui sosialisasi standardisasi diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan tentang standardisasi produk, dan dapat menjadi pengontrol dalam

penerapan standardisasi mutu produk.

- Masih perlunya dilakukan standar komoditi ekspor – impor rokok dan pengolahan tembakau, agar komoditi rokok dan tembakau yang di ekspor dapat sesuai dengan standar masyarakat internasional dan komoditi rokok dan tembakau yang diimpor sesuai dengan SNI.
- Pelatihan tentang penggunaan timbangan yang benar masih akan dilakukan sehingga para petani tidak akan dirugikan dalam prosen penjualan.
- Pengawasan terhadap peredaran barang dalam keadaan tidak terbungkus akan terus dilakukan untuk memberikan perlindungan pada konsumen.
- Pengawasan terhadap peredaran komoditi impor terus akan dilakukan untuk menjamin bahwa barang yang beredar sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia.

URUSAN PERINDUSTRIAN

1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

a) Tujuan

Program ini bertujuan menjadikan industri kecil dan menengah (IKM) sebagai basis industri regional Jawa Timur. Untuk itu IKM dituntut mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif, dan mampu menepati jadwal penyerahan secara disiplin, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumen akhir maupun memenuhi pasokan bagi industri yang lebih hilir.

b) Sasaran

- Pengembangan layanan sistem informasi potensi produksi industri penunjang dan industri terkait.
- Mendorong terjalinnya kemitraan industri penunjang dan industri terkait.
- Pengembangan industri penunjang dan industri terkait.
- Penguatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industrial yang terampil.
- Fasilitasi pengembangan prasarana klaster industri, terutama prasarana teknologinya.
- Fasilitasi dan koordinasikan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan klaster industri, dan penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukungnya.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Rp. 41.590.185.000,00 dengan realisasi Rp. 40.747.290.666,00 (97,97%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Meningkatnya jumlah unit usaha industri sebanyak 41.284 unit usaha atau sebanyak 6%. Yaitu dari 742.671 di tahun 2010, menjadi 783.955 unit usaha. Penumbuhan ini terutama terjadi pada skala usaha kecil dan menengah yang mengalami penumbuhan sebanyak 41.052 unit atau sebesar 6% dibandingkan tahun 2010. Penumbuhan unit baru ini terutama terjadi pada industri makanan, minuman dan tembakau sebanyak 22.704 unit.
- Meningkatnya penyerapan terhadap tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebanyak 82.075 orang atau mengalami peningkatan sebesar 4,9%.
- Meningkatnya nilai produksi Industri Kecil dan Menengah sebesar 3.087 miliar rupiah (4,8%) dari 64.920 miliar rupiah menjadi 68.007 miliar rupiah. Peningkatan ini juga karena adanya dukungan pemerintah untuk menciptakan kemitraan antara IKM dengan penyuplai bahan baku dan kemitraan dagang serta fasilitasi pameran bagi IKM.

e) Permasalahan Dan Upaya Penyelesaian

Permasalahan

- Program pengembangan IKM yang dilakukan oleh Provinsi tidak selaras dengan program pengembangan di kabupaten / kota karena program pengembangan IKM mengacu kepada pusat dan Provinsi sementara kabupaten / kota memiliki agenda tersendiri dalam pengembangan IKM.
- Belum adanya kesadaran dari kabupaten / kota bahwa pendataan yang valid dan up to date sangat berperan dalam proses perencanaan pembangunan.

- Kerjasama yang dilaksanakan melalui Program Mitra Praja Utama (MPU) belum mampu menciptakan kemitraan antara dunia usaha ke-10 Provinsi anggota MPU dalam pengembangan industri.
- Belum adanya sinkronisasi antara program / kegiatan pembangunan Industri Kecil dan Menengah antara Provinsi dan kabupaten / kota sehingga pelatihan ataupun pembinaan yang dilaksanakan di wilayah kabupaten / kota tidak dapat didukung oleh dana kabupaten / kota.
- Program pengembangan klaster industri alas kaki, industri perhiasan, industri berbasis gula, industri perkapalan, industri Kimia dan kondensat serta Industri Lampu Hemat Energi belum sepenuhnya berjalan optimal.
- Peta panduan untuk klaster industri perhiasan, industri berbasis gula, industri Kimia dan kondensat serta Industri Lampu Hemat Energi belum tersusun.
- Pengembangan industri melalui pendekatan klaster, OVOP, komoditi potensial inti daerah dan industri kreatif belum sepenuhnya didukung oleh kabupaten / kota.

Upaya Pemecahan Masalah

- Melaksanakan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota sebelum ataupun pada tahun pembangunan yang sedang berjalan, agar pada saat tahun pembangunan berjalan sudah ada kesepakatan dalam pengembangan komoditi industri.
- Proses pendataan tahun 2012 akan dilakukan melalui 3 cara yaitu melalui pendataan industri oleh kabupaten / kota, kerjasama dengan Badan Pusat Statistik dan melalui pemanfaatan Tenaga Penyuluh Lapangan. Dalam tahun 2012 akan diaplikasikan model akselerasi
- Kerjasama melalui Program Mitra Praja Utama (MPU) akan ditingkatkan melalui optimalisasi potensi industri Jawa Timur.

- Rapat sinkronisasi antara provinsi masih akan terus dilakukan dan diikuti dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan, pembinaan dan sosialisasi pengembangan industri kecil dan menengah di kabupaten / kota untuk memberikan motivasi pada pemerintah kabupaten / kota mendukung program pengembangan industri yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Ataupun sebaliknya Pemerintah provinsi dapat mendukung kegiatan pengembangan industri yang diprioritaskan oleh kabupaten / kota.
- Rapat working group dan temu bisnis masih harus terus dilaksanakan agar terjadi kesamaan visi dan pandangan dalam pengembangan klaster industri alas kaki, industri perhiasan, industri berbasis gula, industri perkapalan, industri Kimia dan kondensat serta Industri Lampu Hemat Energi.
- Peta panduan untuk klaster industri perhiasan, industri berbasis gula, industri Kimia dan kondensat serta Industri Lampu Hemat Energi perlu disusun agar setiap Pihak yang terkait dapat mengetahui dan melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengembangan klaster.
- Komitmen dalam pengembangan industri melalui pendekatan klaster OVOP, komoditi potensial inti daerah dan industri kreatif perlu diperkuat lagi baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten / kota sehingga masing – masing pihak dapat menjalankan perannya dengan baik.

f) **Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi**

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, pada tahun 2011, IKM Jawa Timur telah mendapatkan penganugrahan Upakarti yang diserahkan oleh bapak Presiden pada tanggal 5 Januari 2011. Penganugrahan Upakarti ini dimaksudkan sebagai penghargaan pemerintah pusat kepada perorangan/ lembaga/perusahaan yang dinilai berprestasi dalam

melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan industri kecil secara berkesinambungan. Tujuan dari penganugerahan Upakarti ini adalah untuk mendorong minat dan partisipasi di kalangan masyarakat luas guna berperan secara aktif dalam kerangka penciptaan dan pengembangan wirausaha baru, peningkatan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia.

1. Bidang Jasa Pengabdian, Dr. H. Makhfud Efendy, SPi. Msi
2. Bidang Jasa Kepeloporan. PT. Aneka Banusakti Gempol Pasuruan
3. Bidang Jasa Kepeloporan, Nisoku Kota Blitar

2) Pogram Peningkatan Nilai Tambah Industri Berbasis Berbasis Sumberdaya Alam

a) Tujuan

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah industri melalui pengembangan teknologi industri

b) Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan program ini adalah untuk memperkuat struktur industri Kecil dan menengah serta meningkatkan daya saing industri

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Nilai Tambah Industri Berbasis Berbasis Sumberdaya Alam sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan realisasi Rp. 188.847.200,00 (94,42%), %, secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Meningkatnya nilai ekspor rokok sebesar 2,39% sementara volume mengalami penurunan sebesar 20,17%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan nilai jual ekspor rokok dari US \$ 6,4 / kg tahun 2010 menjadi US \$ 8,3.

e) Permasalahan dan Upaya dan Pemecahan Masalah

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah ;

- Banyaknya tantangan dalam pengembangan industri hasil tembakau dan rokok, karena maraknya promosi kesehatan untuk pelarangan konsumsi rokok.
- Masih sulitnya mendapatkan bahan baku dalam jumlah yang cukup dan pada waktu yang tepat.

Upaya Pemecahan Masalah

- Sampai saat ini sedang direncanakan kerjasama dengan pemerintah kabupaten / kota agar tidak secara penuh membatasi ruang lingkup pengguna rokok, sebab industri ini telah memberikan devisa yang besar buat Provinsi Jawa Timur.
- Suplai bahan baku akan dilaksanakan melalui impor bahan baku secara nasional maupun internasional.

3) Pogram Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri

a) Tujuan

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan industri dalam menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dalam uji komersialisasi hasil penelitian, dan pengembangan rancangan produk baru, maupun proses produksi serta pemanfaatan sumber daya lokal.

b) Sasaran

- Pengembangan klaster industri berbasis teknologi.
- Peningkatan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pada industri manufaktur.

- Mendorong pengembangan dan pemanfaatan manajemen produksi yang memperhatikan keseimbangan dan daya dukung lingkungan hidup, serta teknik produksi yang ramah lingkungan (*clean production*).

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri sebesar Rp. 12.964.275.000,00 dengan realisasi Rp. 12.712.653.221,00 (98,06%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Pencapaian PAD tahun 2011 sebesar Rp. 4,695,222,098,- dari target sebesar Rp. 5,200,000,000,- atau sebesar 90,29 %. Sedangkan pencapaian PAD pada tahun 2010 sebesar Rp. 5,557,413,- dari target sebesar Rp. 5,000,000,000,- atau sebesar 111,15 %. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pelayanan Unit Pelayanan Teknis Industri semakin dirasakan oleh dunia usaha.
- Meningkatnya pelayanan teknis kepada Industri Kecil Menengah dari 8,656 unit di tahun 2010 menjadi 5,144 unit, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 69,26%.

e) Permasalahan dan Upaya dan Pemecahannya

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan 16 kegiatan tersebut diatas, adalah ;

- Masih banyaknya IKM yang melakukan produksi tanpa memperhatikan konsep clean dan green production. Hal ini terutama ditemui dalam produksi batik, penyamakan kulit dll.
- Banyaknya IKM di lingkungan UPT belum memiliki IPAL.

- Belum adanya pemanfaatan optimal dari sisa buangan produksi industri.
- Masih terbatasnya pengembangan desain produk di UPTI Kulit Magetan, UPTI Aneka Surabaya dan UPTI Logam Sidoarjo.

Upaya Pemecahan

- Akan dilakukan sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan pendampingan yang berkonsep clean dan green production kepada IKM agar mereka nantinya mampu menerapkan konsep clean dan green production dalam memproduksi.
- Semua UPT akan diarahkan untuk memiliki UPL dan UKL sehingga mampu mengelola IPALnya dan menjadi percontohan bagi IKM sekitarnya.
- UPT maupun bidang perlu untuk melaksanakan pelatihan teknik produksi yang memanfaatkan hasil sisa buangan suatu industri. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan jumlah wirausaha tetapi juga bermanfaat dalam pengelolaan lingkungan yang hijau dan bersih.
- Setiap UPT akan diarahkan untuk melakukan pengembangan desain industri melalui peningkatan SDM, revitalisasi alat dan mesin produksi maupun pembuatan prototipe produk guna meningkatkan pelayanan UPT kepada Industri Kecil Menengah.

4) Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

a) Tujuan

Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja industri, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi.

b) Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan program ini adalah untuk

- Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri.
- Penyelenggaraan program-program pelatihan tenaga kerja industri berbasis kompetensi.
- Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur pelatihan tenaga kerja industri.
- Peningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan tenaga kerja industri.
- Penguatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industri.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia sebesar Rp. 8.459.825.000,00 dengan realisasi Rp. 8.397.369.660,00 (99,26%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Adanya pengakuan nasional terhadap kemampuan SDM industri Jawa Timur dalam pengembangan industri melalui penganugrahan Upakarti Tahun 2011 kepada 3 perusahaan di Jawa Timur. Selain itu juga penganugrahan Prima Karya Mutu kepada IKM yang secara konsisten melaksanakan pengawasan dan pemantauan mutu produksi. Komitmen IKM Jawa Timur untuk menjadi SDM nomor satu di Indonesia dalam peningkatan mutu, juga ditunjukkan dengan keberhasilan Jawa Timur menjadi juara I dalam Konvensi Gugus Kendali Mutu (GKM) Tingkat Nasional. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peranan Disperindag yang pada tahun 2011 telah melaksanakan pembinaan mutu dan design produk kepada 790 Industri Kecil dan Menengah

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

Terbatasnya jumlah karyawan yang menguasai bidang – bidang teknis sehingga pendampingan tidak dapat dilakukan secara optimal .

Upaya Pemecahan Masalah

- Pelaksanaan pendidikan bagi karyawan disperindag untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang teknis
- Melakukan outsourcing dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga pendamping

f) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi

Penghargaan yang diterima berkaitan dengan pelaksanaan program ini, adalah penghargaan Juara I Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat Nasional untuk kategori Peningkatan Percepatan Produktivitas (3P). Penghargaan ini diterima oleh IKM Makanan Kali Mashada dari Kota Surabaya, yang berhasil meningkatkan mutu dan produktivitas dalam memproduksi kue kering.

5) Program Peningkatan Standardisasi Industri

a) Tujuan

Program ini bertujuan meningkatkan perluasan penerapan standardisasi industri untuk menghasil produk-produk berkualitas sesuai permintaan pasar di dalam maupun luar negeri, sekaligus untuk perlindungan konsumen.

b) Sasaran

- Peningkatan penerapan standardisasi produk industri manufaktur.
- Pengembangan infrastruktur kelembagaan standardisasi produk industri manufaktur.
- Peningkatan persepsi masyarakat tentang standar produk industri manufaktur.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Standardisasi Industri sebesar Rp. 14.164.715.000,00 dengan realisasi Rp. 13.763.272.968,00 (97,17%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Meningkatnya penerapan standardisasi oleh dunia usaha. Tahun 2011, terdapat tambahan 100 IKM yang menggunakan sertifikat halal, 201 IKM yang menerapkan ISO, SNI, GKM dan Barcode serta 365 perusahaan industri yang mendapatkan sertifikasi produk dan HKI.
- Berhasilnya IKM Jawa Timur sebagai juara I dalam lomba desain alas kaki Nasional. Keberhasilan ini tidak terlepas dari pembinaan desain produk industri yang diberikan kepada 125 IKM dan pelaksanaan lomba desain alas kaki, batik, perhiasan dan kemasan Tingkat Provinsi

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Masih rendahnya kesadaran IKM untuk mendapatkan SNI dan ISO sebagai salah satu faktor dalam peningkatan daya saing industri
- Masih kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang HAKI
- Masih banyaknya produksi rokok tanpa cukai
- Masih kurangnya ketrampilan dan kemampuan dalam pengembangan desain produk

Upaya Pemecahan Masalah

- Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan ISO dan SNI kepada IKM. Selain itu juga dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak – pihak lain yang dapat memberikan fasilitasi SNI dan ISO kepada IKM.

- Sosialisasi dan fasilitasi HKI akan terus dilakukan, dengan melibatkan pihak – pihak lain yang terkait.
- Pembinaan dan pendampingan kepada Industri Kecil Rokok akan terus dilakukan. Selain itu, kerjasama dengan Pihak – Pihak terkait akan ditingkatkan.
- Untuk meningkatkan desain produk industri maka pelatihan, pembinaan dan pendampingan dalam peningkatan desain akan dilakukan. Dalam upaya peningkatan desain ini, akan melibatkan Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil Menengah (TPL-IKM) karena mereka ini merupakan agent di lapngan. Selain itu, untuk memberikan penghargaan kepada IKM yang telah melakukan peningkatan desain, maka lomba desain produk industri akan tetap dilaksanakan.

f) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi

Melalui Pelaksanaan program ini, Industri Kecil dan Menengah alas kaki dari desa Miji Kota Mojokerto memperoleh juara I dalam lomba Desain alas Kaki Tingkat Nasional. Selain itu untuk tingkat Provinsi, telah diberikan penghargaan kepada 9 IKM yang berhasil mendapatkan juara 1,2 dan 3 dalam Lomba Desain industri perhiasan, industri alas kaki dan industri batik.

6) Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam

a) Tujuan

Program ini bertujuan memperkuat basis produksi untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri yang berbasis sumber daya alam.

b) Sasaran

- Pengembangan dan peningkatan industri berbasis agro (agroindustri), terutama di kawasan agropolitan.
- Penumbuhan dan pengembangan industri berorientasi ekspor yang memanfaatkan sumber daya alam lokal.

- Fasilitas sinergitas pengembangan industri di wilayah selatan dan wilayah utara Jawa Timur.
- Pengembangan dan diversifikasi bahan baku industri

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam sebesar Rp. 7.657.000.000,00 dengan realisasi Rp. 7.415.213.886,00 (96,84%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Meningkatnya jumlah unit industri agro sebanyak 12.525 unit (2,2%) dari 552.666 unit pada tahun 2010. Sementara itu, tenaga kerja pada industri agro sebanyak 75.553 orang (3,4%) dari 2.176.943 orang tahun 2010. Selain itu juga terjadi peningkatan produksi senilai 2.388 miliar rupiah (1,8%) dari 132.302 miliar rupiah tahun 2010

e) Permasalahan Dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan IKM pangan dalam melakukan diversifikasi dan inovasi dalam pengolahan komoditi hasil pertanian, perkebunan maupun kehutanan baik dalam jenis, bentuk maupun kemasan.
- Masih banyaknya sumberdaya pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan belum diolah.

Upaya Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka perlu dilaksanakan

- Pelatihan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan akan terus dilakukan.
- Dilakukannya pelatihan teknik produksi industri kepada masyarakat di daerah – daerah yang kaya dengan hasil pertanian, perikanan,

perkebunan maupun kehutanan untuk menciptakan wira usaha baru dan meningkatkan nilai tambah produksi.

- Perlunya kerjasama dengan instansi pendidikan yang membantu IKM dalam pengembangan industri.

f) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi

Melalui pembinaan dan pendampingan yang dilakukan melalui program ini, tahun 2011. IKM Kopi Lanang Gresik berhasil meraih juara I Tingkat Nasional dalam lomba management IKM.